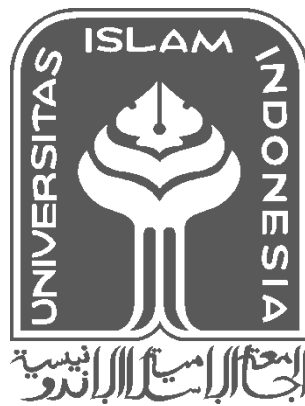


**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN, DANA ALOKASI UMUM,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, LUAS WILAYAH TERHADAP
BELANJA MODAL DAN KUALITAS PEMBANGUNAN
MANUSIA**



SKRIPSI

Oleh:

**Nama: Yedizal Arfianto
No. Mahasiswa 09312332**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN, DANA ALOKASI UMUM,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, LUAS WILAYAH TERHADAP
BELANJA MODAL DAN KUALITAS PEMBANGUNAN
MANUSIA**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat
untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh:

**Nama: Yedizal Arfianto
No. Mahasiswa: 09312332**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juni 2013

Penyusun,



Yedizal Arfianto

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN, DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA**

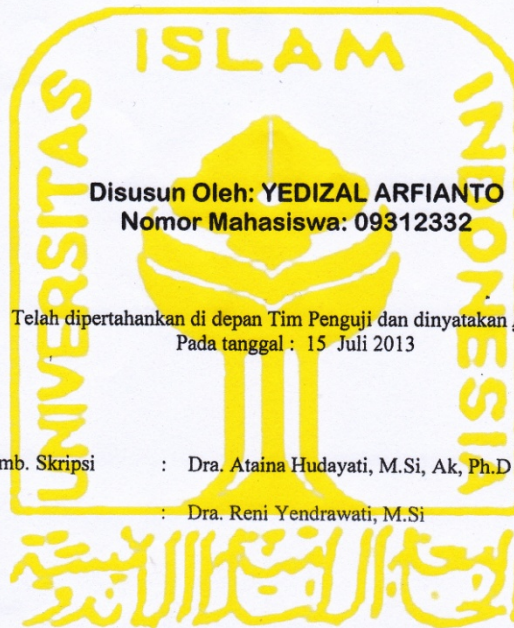


Ataina Hudayati, M.Si., Ph.D., Ak.
NIP : 913120102

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD, SiLPA, Luas Wilayah terhadap
Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia**



Penguji/Pemb. Skripsi : Dra. Ataina Hidayati, M.Si, Ak, Ph.D
Penguji : Dra. Reni Yendrawati, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
2. Ibu Ataina Hidayati M.Si, Ak, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing ,
terimakasih Ibu untuk waktu dan bimbingannya.
3. Ibu Dra. Reni Yendrawati, M.Si selaku Dosen Penguji, terima kasih ibu
untuk waktu dan ujiannya.
4. Ibu Dra. Isti Rahayu, M. Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Seluruh dosen FE UII lainnya, khususnya jurusan akuntansi atas segala ilmu yang telah diajarkan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari amal ibadah. Tidak lupa juga kepada seluruh petugas dan karyawan FE UII.
6. Kedua Orang tua (Bp Zaenuddin dan Ibu Aslichah) untuk doa yang tak pernah usai, kasih sayang, cinta dan kesabar yang engkau berikan pada putramu ini. Tiada kata terindah selain terima kasih yang dapat putramu berikan
7. Kedua Adikku (Ervan dan Rifki) makasi untuk dukungan dan doanya, belajarliah yang rajin dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua.
8. Ayu Akhira yang selalu support yang selalu mendukung dan mengajarkan kesabaran serta selalu mengingatkan untuk terus berusaha. Teman – teman Rizha, Risha, Jacky, Wisnu, Priok, Beni, Mitha, Elida, Angga, Putra, Faisal, Asep, Sandy terima kasih atas hiburannya dan kebersamaannya.
9. Teman – teman FE UII 2009, Agil, Arif, Bustan, Isal, Lutfi, Gumilang, terima kasih atas bantuannya dalam menyusun skripsi ini.
10. Dan semua orang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mendoakan saya, yang sayang dengan saya, yang mendukung saya.

Semoga budi baik bapak/Ibu, Saudara/i dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, Juni 2013

Penyusun

(Yedizal Arfianto)

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA UJIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7

1.5	Manfaat Penelitian	7
-----	--------------------------	---

BAB II KAJIAN TEORITIK

2.1	Landasan Teori.....	9
2.1.1	Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia	10
2.1.2	Kualitas Pembangunan Manusia / IPM.....	13
2.1.3	Belanja Modal	14
2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto	16
2.1.5	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran / SiLPA.....	18
2.1.6	Luas Wilayah	18
2.1.7	Pendapatan Asli Daerah / PAD.....	19
2.1.8	Dana Alokasi Umum / DAU	24
2.2	Penelitian Terdahulu	26
2.3	Kerangka Pemikiran.....	29
2.4	Hipotesis Penelitian.....	30
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.....	30
2.4.2	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal	32
2.4.3	Pengaruh SiLPA dengan Belanja Modal	33
2.4.4	Pengaruh Luas Wilayah dengan Belanja Modal	35
2.4.5	Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal	35
2.4.6	Pengaruh Belanja Modal dengan Kualitas Pembangunan Manusia....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.1	Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	40
3.1.2	Definisi Operasional	40

3.1.3	Metode Pengukuran Variabel.....	43
3.1.4	Populasi dan Sampel	44
3.1.5	Jenis dan Sumber Data	45
3.1.6	Metode Pengumpulan Data	45
3.2.1	Metode Analisa Data	46
3.2.2	Statistik Deskriptif	47
3.2.3	Uji Asumsi Klasik	47
3.2.3.1	Uji Normalitas	47
3.2.3.2	Uji Multikolinieritas	49
3.2.3.3	Uji Autokorelasi	49
3.2.3.4	Uji Heteroskedastisitas	50
3.2.4	Analisis Regresi Linier	51
3.2.5	Pengujian Hipotesis	53
3.2.5.1	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	53
3.2.6	Uji Signifikasi Stimulan (Uji Statistik F)	54
3.2.7	Uji Secara Parsial	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Analisis Deskriptif	55
4.2	Analisis Statistik	59
4.2.1	Uji Asumsi Klasik	59
4.2.1.1	Uji Normalitas	59
4.2.1.2	Uji Multikolinieritas	61
4.2.1.3	Uji Autokorelasi	62

4.2.1.4 Uji Heteroskedastitas	63
4.2.2 Analisis Regresi Linier.....	64
4.2.3 Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	67
4.2.4 Pengujian Secara Serentak	68
4.2.5 Uji Secara Parsial	69
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	70
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....	70
4.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal	72
4.3.3 Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal	72
4.3.4 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	74
4.3.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.	75
4.3.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	79
5.3 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

2.1	Kerangka Pemikiran.....	27
2.2	Kerangka Pemikiran Teoritis Model 1	29
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis Model 2	30
3.1	Operasionalisasi Variabel.....	43
3.2	Pengambilan Keputusan ada tidaknya Autokorelasi.....	50
4.1	Statistik Deskriptif	57
4.2	Uji Normalitas.....	61
4.3	Uji Multikolinieritas.....	62
4.4	Uji Autokorelasi	64
4.5	Analisis Regresi Linier.....	66

DAFTAR GAMBAR

4.1	Uji Heteroskedastisitas.....	65
-----	------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1	Pertumbuhan Ekonomi.....	86
2	Pendapatan Asli Daerah	87
3	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran.....	88
4	Luas Wilayah	89
5	Dana Alokasi Umum.....	90
6	Belanja Modal.....	91
7	Indeks Pembangunan Manusia.....	92
8	Descriptive	93
9	Reggresion	94
10	Uji Multikolinieritas.....	96
10	Uji Heteroskedastisitas.....	97
11	Uji Normalitas.....	98
12	Reggresion	99

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA), Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi-Provinsi Se Jawa Tahun 2004-2010. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dimana dalam penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka yang bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, obyek dalam penelitian yaitu Provinsi-Provinsi Se Jawa yang mempublikasikan Laporan Keuangan APBD dan Laporan IPM tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; analisa data deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Dana Alokasi Umum (DAU). Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan, dan Luas Wilayah berpengaruh negatif signifikan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Luas Wilayah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

ABSTRACT

This research is purposed to determine the effect of local revenue (PAD), Economic Growth, General Allocation Fund (DAU), Budget Financing Surplus (SiLPA), Wide Area, to the Capital Expenditure and Human Development Index (IPM) in the Provinces of Java years 2004-2010. This research is quantitative, which is emphasizes on testing theories through the measurement of research variables with numbers that aims to examine the hypothesis. This study is an empirical research, the objects are the Provinces of Java that is publishing Financial Reports of APBD and Human Development Index (IPM) report fiscal year 2004 until 2010. Data analysis techniques used in this study include; descriptive data analysis, classical assumption testing, simple linear regression test and multiple linear regression.

The results of this research showed that the variables which have significant positive effect on Capital Expenditure are Local Revenue (PAD), Budget Financing Surplus (SiLPA), and General Allocation Fund (DAU). Capital Expenditure has significant positive effect on the Human Development Index (IPM). While economic growth has negative impact not significant, and Wide Area takes significant negative effect.

Keywords: Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Budget Financing Surplus (SiLPA), Wide Area, Capital Expenditure and Human Development Index(IPM)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah telah mengubah peta politik dalam penataan kewenangan dan kewajiban pemerintahan. Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Selama orde baru sentralisasi kekuasaan sangat terasa dalam setiap aktivitas pemerintahan di daerah, bahkan rancangan pembangunan disetiap daerah lebih sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sentralisasi telah membuat birokrasi di daerah selalu didikte dan menunggu petunjuk dari pusat. Sentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang sangat lebar antar daerah, misal alokasi dalam penggunaan anggaran Negara dan kelambanan dalam menuntaskan persoalan.

Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelolala sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di daerah (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (publik service) dan memajukan perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32/2004 , otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2007).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun

kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Halim, 2007).

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Ardhini, 2011). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami fiskal rendah (Halim, 2007).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana

perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No. 34/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peran yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja tidak logis jika proporsi anggaran lebih banyak untuk belanja rutin (Mardiasmo, 2002). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik DAU maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan

ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam menyusun anggaran.

Perbaikan prioritas ini akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila indeks pembangunan manusianya rendah maka akan menentukan tingkat kesejahteraan individu yang pada akhirnya juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penelitian tentang anggaran di pemerintah daerah sesungguhnya telah banyak dilakukan seperti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Dodik dan Kusnandar, 2010), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Darwanto dan Yulia, 2007), Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia (Fhino dan Priyo, 2009), Meskipun demikian penelitian di Indonesia mengenai Anggaran Belanja Modal, khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap Belanja Modal masih kurang dilakukan hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah SiLPA (Sisa Anggaran Lebih) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
5. Apakah Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
6. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kualitas Pembangunan Manusia ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Laporan Keuangan yang diamati adalah Laporan Keuangan Daerah periode 2004 – 2010.
2. Laporan Produk Regional Domestik Bruto periode 2004 - 2010.
3. Indeks Pembangunan Manusia periode 2004 – 2010.
4. Luas Wilayah di Pulau Jawa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
4. Pengaruh Sisa Anggaran Lebih (SiLPA) terhadap Belanja Modal.
5. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
6. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai masukan dalam menyusun kebijakan di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

2. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan.

3. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Landasan teori

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 2006).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik.

Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda. Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent

2.1.1 Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan hal yang tak dapat dipisahkan sebagai akibat penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Pembahasan anggaran dilakukan eksekutif dan legislatif dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui bargaining dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran, sebelum anggaran

ditetapkan menjadi suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan menjadi acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam pertanggungjawaban kepala daerah.

Penyusunan APBD diharapkan dapat menampung dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat sebagai refleksi pemerintahan Otonomi Daerah yang baik. Pada kenyataannya penyusunan APBD menjadi sangat sulit dimana keterbatasan dana menjadi masalah besar yang harus dihadapi Pemerintah Daerah. Berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang begitu banyak dengan sumber daya daerah yang terbatas menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi seluruh permintaan publik. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memilih bidang mana saja yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan tersebut (Mardiasmo, 2002).

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini

merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *Multi- Term Expenditure Framework (MTEF)* menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001 dalam Anggiat Situngkir, 2009).

Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan

perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.2 Kualitas Pembangunan Manusia

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia (Suyanto, 2009 dalam Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009). Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan *Human Development Index (HDI)*. IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara berkualitas, baik dari aspek kesehatan pendidikan, maupun aspek ekonomi. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

IPM merupakan gabungan dari tiga unsur utama pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) yang diukur oleh tingkat melek orang dewasa (dengan timbangan dua pertiga) serta rata-rata tahun bersekolah (timbangan : satu pertiga), standar hidup layak (*standar of living*) yang diukur oleh PDB perkapita setelah disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity / PPP*).

Pembangunan yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori

ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan manusia (Gevisioner, 2004 dalam Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009).

Salah satu ukuran IPM adalah besarnya pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pendidikan (Kuncoro, 2004). Untuk meningkatkan IPM khususnya dalam bidang pendidikan, caranya dengan memberantas buta aksara. Hal ini akan menjadikan masyarakat menjadi melek aksara. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995:12).

2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006). Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/

pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan,

sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000 (BPS 2003).

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yakni:

a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah dimana Nilai Tambah Bruto (NTB) diperoleh dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

b. Pendekatan pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan. berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi (BPS , 2003)

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran / SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar daripada komponen Pengeluaran Pembiayaan. (Balai Litbang, 2008)

2.1.6 Luas Wilayah

Dalam penjelasan UU No 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana adalah luas wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Luas wilayah dalam hal ini apakah besarnya berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal pemerintah yang erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik. Daerah dengan luas wilayah yang luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai

syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang tidak begitu luas

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah / PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi kemandirian suatu daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004 :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

a. Pajak Daerah

Berdasar penjelasan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang –Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Pajak hotel dan restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.
 - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Selanjutnya pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing masing

jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor 5 %
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10 %
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 %
- d. Pajak hotel dan restoran 10 %
- e. Pajak hiburan 35 %
- f. Pajak reklame 25 %
- g. Pajak penerangan jalan 10 %
- h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20 %

Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetapannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.

b. Retribusi Daerah

Dalam Bambang Kesit (2004) menjelaskan bahwa yang dimaksud Restribusi Daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu : retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri Pemerintah Pusat terlalu menguasai sektor sektor tersebut sehingga Pemerintah Daerah terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola kekayaannya sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
- 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.8 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004).

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapital fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal balance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. Equalization grant berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Sigit, 2003; Kuncoro, 2004; Anggiat, 2009).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiscal gap* yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan dengan Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan

konsep *fiscal gap*, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya. Dodik Kusnandar (2010) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal, memperoleh hasil secara empiris Belanja Modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh. Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal dan memperoleh hasil yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Fhino Andrea dan Priyo Hadi (2009) meneliti Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, menemukan bahwa Dana Alokasi Umum, Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran

Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
Dodik Kusnandar / 2010	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal	DAU, PAD, SiLPA, Luas Wilayah, Belanja Modal	secara empiris Belanja Modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah

			berpengaruh
Darwanto dan Yustikasari / 2007	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD, Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Fhino Andrea dan Priyo Hadi / 2009	Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia	DAU, Belanja Modal, Kualitas Pembangunan Manusia (IPM)	Dana Alokasi Umum, Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.

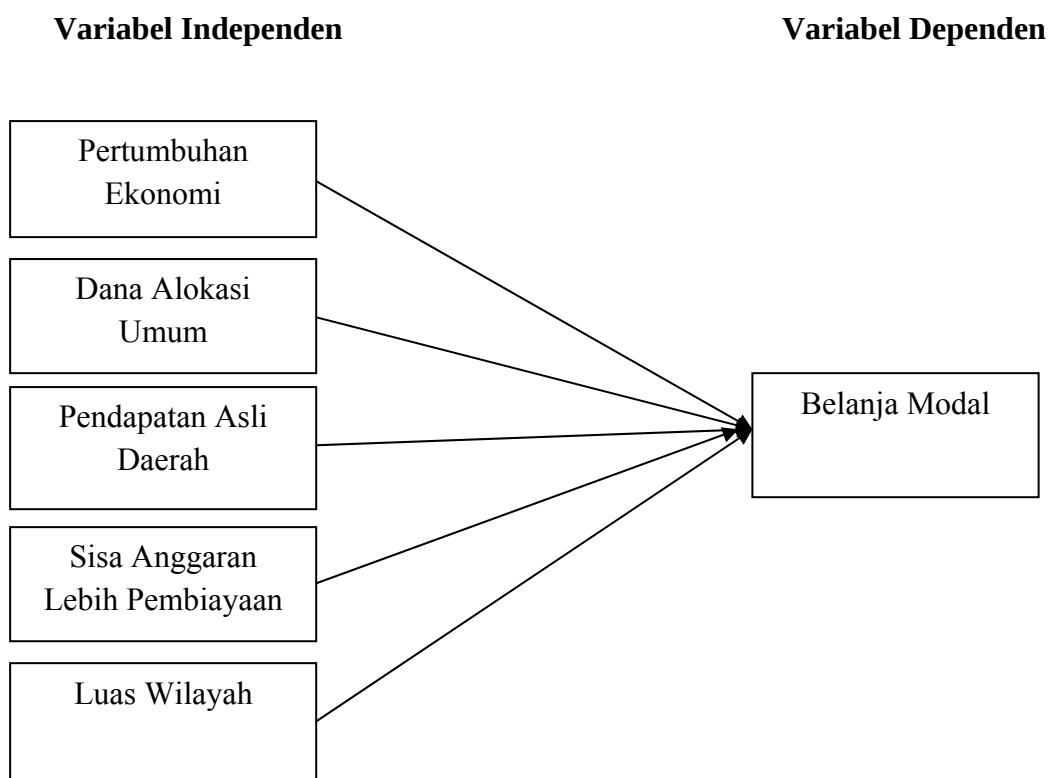
Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan Fhino Andrea dan Priyo Hadi (2009). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Fhino Andrea dan Priyo Hadi terletak pada variabel PAD, SiLPA, Pertumbuhan Ekonomi, waktu dan objek penelitian, sehingga penelitian ini akan menguji

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Anggaran, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Kualitas pembangunan Manusia.

2.3 Kerangka Pemikiran

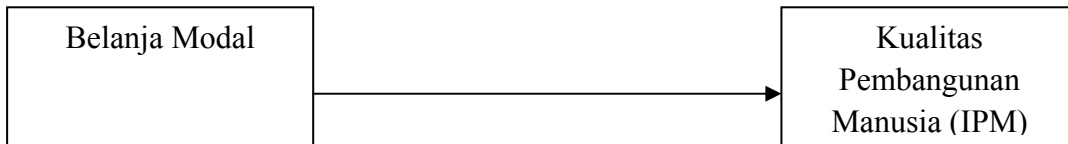
Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan kajian teoritis serta permasalahan yang telah dikemukakan maka secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis (Model 1)



Sumber : dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (Model 2)



Sumber : dikembangkan berdasarkan penelitian terdahulu

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Aziz et al (2000), Blackley (1986), Joulfaian & Mokeerjee (1990), Legrensi & Milas (2001), Bambang, 2004. Mereka menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama tax spend hyphotesis (Aziz2000; Doi (1998) Bambang, 2004)). Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (di antaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover & Sheffrin, 1992, Bambang, 2004) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Konduras, dan Paragauy.(Bambang, 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan

meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover dan Sheffrin, 1992. yakni secara empiris menemukan akan perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak mempengaruhi (*causally independent*).

Adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD kedalam bisnis sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. dan PAD ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah *incrementalism*. Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun

sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan.

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif Signifikan terhadap Belanja Modal

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja Modal

Kuncoro (2004) Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Boediono (1985) dalam Priya Adiwiyana (2011) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002).

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H2 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Signifikan Positif terhadap Belanja Modal

2.4.3 Pengaruh Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diindikasikan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal untuk pelayanan publik. Belum ada penelitian mengenai pengaruh SiLPA terhadap

belanja modal karena dalam pelaksanaannya terkadang belum ada maksimalisasi pemanfaatannya seperti kutipan oleh Abdul Hafiz Tanjungdi bawah ini :

“Silpa sebesar 40,27% dari APBD Jabar 2008 tersebut datanganya dari penundaan program dan kegiatan, maka dapat dikatan bahwa sumber daya manusia pemda Jabar pada tahun 2008 lebih banyak menganggur dibanding bekerja melayani kebutuhan masyarakat, dan secara keseluruhan bisa juga dikatakan bahwa pemda Jabar tidak mampu mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya (manusia, dana, dan peralatan) menghasilkan barang/jasa untuk dinikmati masyarakat sehingga hak-hak masyarakat Jabar jadi hilang pada tahun 2008. Ketidak mampuan ini bisa disebabkan rendahnya profesionalitas dan kompetensi pegawai. Barang/jasa tersebut dapat berupa perbaikan jalan umum yang rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana lainnya yang dapat dinikmati masyarakat Jawa Barat”.

Selain itu, SiLPA yang digunakan untuk pembiayaan juga berdasarkan persetujuan dewan legislatif. Dalam perspektif teori keagenan, Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah turut mencanangkan jumlah alokasi dan pemanfaatan pembiayaan sehingga pihak legislaif mendapatkan wewenangnya kembali. Pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah adalah agen dan pihak legislatif adalah prinsipal.

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H3 : Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh Signifikan Positif terhadap Belanja Modal

2.4.4 Pengaruh Luas Wilayah dengan Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaraan pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Maka hipotesis luas wilayah terhadap belanja modal adalah :

H4 : Luas Wilayah berpengaruh Positif Signifikan terhadap Belanja Modal

2.4.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002, dalam Bambang, 2004). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000; dan Doi, 1998, Bambang, 2004).

Sementara studi tentang pengaruh grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja Pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang, 2004). Secara teoritis respon tersebut akan mempunyai efek distributif alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendanaan lain, misalnya pendapatan pajak daerah (Bambang, 2004). Namun dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau grants tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (Flypaper Effect). Holtz-Eakin, et al (1985, dalam Bambang, 2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Dari beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, dan DAU ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H5 : Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif Signifikan terhadap Belanja Modal

2.4.6 Pengaruh Belanja Modal dengan Kualitas Pembangunan Manusia (IPM)

Dengan total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga dari pemerintah yang berupa DAU, PAD, SiLPA maka alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat juga semakin baik. Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya dibidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Belanja modal ini dapat berupa pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai untuk kenyamanan bersekolah. Jadi , yang dipikirkan saat ini bukan hanya alokasi tinggi bagi kemajuan bangsa yang dilihat dari kekayaan, melainkan juga pengalokasian dana yang lebih tinggi bagi belanja untuk peningkatan kesejahteraan. Saat ini yang terjadi belanja modal untuk gedung, perlatan, dan kendaraan bermotor meliputi lebih dari setengah total belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan (World Bank, 2006).

Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh PAD masing-masing daerah, serta berapa banyak sektor yang harus dibiayai oleh Pemkot / Pemda. Daerah yang PAD-nya tinggi mungkin bisa akan merealisasikan anggaran minimal 20% dari APBD untuk belanja modal dalam peningkatan aset untuk masyarakat. Sementara daerah yang PAD-nya kecil atau bahkan tidak ada sumber pendapatan bisa diandalkan akan merasa terbebani. Kemajuan dalam pendidikan juga bisa meningkatkan kualitas manusia. Dalam UU No. 20 Thn 2003, Bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan

menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Penggunaan indikator kesejahteraan yang komprehensif dan akomodatif terhadap konsepsi pembangunan yang berkelanjutan sangat penting. Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan untuk belanja modal dilaksanakan melalui antara lain; penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas. Kemajuan pendidikan ini dapat dilihat dari indikator: dapat membaca dan menulis, penduduk usia sekolah, penduduk masih sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi (Badan Pusat Statistik, 2006).

Sedangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pemerataan pembangunan di bidang kesehatan, fokus kegiatan akan ditetapkan pada: (i) peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin; (ii) peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal; (iii) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; (iv) penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak

balita; (v) peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan; serta (vi) revitalisasi program KB (BPS, 2004).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memiliki peranan penting guna peningkatan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini(yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H6 : Belanja Modal berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Mamusia / Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.1 Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sekaran (2006) variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan 5 variabel Independen, 1 variabel Penghubung, dan 1 variabel dependen, ketujuh variabel penelitian antara lain:

Variabel Independen :Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto

Dana Alokasi Umum / DAU

Pendapatan Asli Daerah / PAD

Luas Wilayah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran / SiLPA

Variabel Penghubung :Belanja Modal

Variabel Dependen :Kaulitas Pembangunan Manusia / IPM

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi tersebut diproksikan dengan PDRB harga berlaku dengan menggunakan skala rasio

b. Dana Alokasi Umum

DAU adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Prakosa, 2004).

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002). yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan yang sah (UU No. 22 th 2009). Pendapatan Asli daerah ini diukur dengan menjumlahkan seluruh penerimaan daerah selama 1 tahun anggaran.

d. Luas Wilayah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

e. SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun sebelumnya. Variabel ini diukur dari jumlah SiLPA yang ada di Laporan Realisasi APBD per Provinsi

f. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum

g. Kualitas Pembangunan Manusia

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

3.1.3 Metode Pengukuran Variabel

Untuk mengukur variabel-variabel yang sudah diidentifikasi digunakan instrumen dan alat ukur sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Indikator	Kriteria / Ukuran	Skala Pengukuran
Dependen	Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2004 – 2010	Rasio
Penghubung	Belanja Modal	Laporan APBD Provinsi se-Jawa	Anggaran Belanja Modal tahun 2004 – 2010	Rasio
Independen	Pertumbuhan Ekonomi	Laporan Hasil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Jawa	Berdasarkan PDRB atas harga Konstan tahun 2004 - 2010	Rasio
Independen	Dana Alokasi Umum	Laporan APBD	Anggaran DAU tahun	Rasio

		provinsi se-Jawa	2004 – 2010	
Independen	Pendapatan Asli Daerah	Laporan APBD provinsi se-Jawa	Anggaran PAD tahun 2004 - 2010	Rasio
Independen	Luas Wilayah	Laporan Luas Wilayah provinsi se-Jawa	Luas Wilayah provinsi se-Jawa tahun 2004-2005	Rasio
Independen	SiLPA	Laporan APBD provinsi se-Jawa	Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.	Rasio

3.1.4 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi di Indonesia, sedangkan jumlah sampel provinsi se Jawa yang meliputi Jawa Tengah, Jawa

Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten tahun 2004 - 2010. Alasan pemilihan sampel di 6 provinsi ini adalah karena ketersediaan data terutama data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sarana prasarana diprovinsi jawa lebih merata dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

3.1.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Indeks Pembangunan Manusia, Laporan Luas Wilayah Indonesia, Laporan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) dan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta dan yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dari tahun 2004 - 2010. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dari Laporan Indeks Pembangunan Manusia diperoleh data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari laporan Luas Wilayah diperoleh data mengenai Luas Wilayah dan dari Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) diperoleh pertumbuhan ekonomi.

3.1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Indeks Pembangunan Manusia, Laporan Luas Wilayah Indonesia, Laporan Produk

Domestik Regional Bruto (PRDB) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Yogyakarta dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dari tahun 2004 – 2010.

3.2.1 Metoda Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Suryabrata, 2000). Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti.

Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis Least Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana didalam penelitian ini, 5 komponen antara lain PAD, DAU SiLPA, Pertumbuhan Ekonomi dan luas wilayah sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal, dan kemudian belanja modal akan di analisis pengaruhnya terhadap IPM sebagai variabel dependen.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

3.2.2 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia.

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

3.2.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka modelregresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi

dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

3.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai $VIF >10$ (Ghozali, 2006).

3.2.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Ghozali, 2006).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

Tabel 3.2
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Imam Ghozali, 2006

3.2.3.4 Uji Heterosdekasitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.2.4 Analisa Regresi Linier

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan terhadap belanja modal. Regresi sederhana digunakan untuk menguji belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 17.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (sekarang, 1992). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah :

Persamaan regresi berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 LW + \beta_5 SiL + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

LW = Luas Wilayah

SiL = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

E = *error*

Persamaan regresi sederhana :

$$Y = \alpha + \beta_1 BM + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Pembangunan Manusia

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

BM = Belanja Modal

3.2.5 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

3.2.5.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.2.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3.2.7 Uji Secara Parsial

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2006). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau tidak menggunakan :

- a. Melihat *probabilities values*

Probabilities value $(p) > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. *Probabilities value* $(p) < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Pemerintah Propinsi se Pulau Jawa Periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, SilPA, luas wilayah dan dana alokasi umum terhadap Belanja Modal serta pengaruh belanja modal terhadap Kualitas pembangunan manusia.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari rata-rata, standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Regresi Linier Sederhana. Mengingat data yang diperoleh memiliki satuan yang berbeda, maka dalam analisis regresi data terlebih dahulu dilakukan transformasi logaritma (log).

4.1 Analisis Deskriptif

Dalam analisis deskriptif ini, data dijelaskan dalam bentuk satuan masing-masing yang belum dilakukan transformasi logaritma, agar mudah dijelaskan

seberapa besar nilai dari masing-masing variabel yang diteliti. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif (dalam rupiah)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	42	347.404.225,00	11.824.970.000,00	3.816.617.873,67	3.019.255.095,69
PE	42	0,95	17,92	10,10	6,35
SiLPA	42	- 53.835.952.663, 00	3.265.231.795,00	- 1.162.804.912,33	8.488.758.406,51
Luas Wilayah	42	740,00	47.130,15	21.347,15	17.833,12
DAU	42	0,00	7.730.239.000,00	1.218.913.064,90	1.835.799.571,13
Belanja Modal	42	94.747.519,00	7.545.074.342,00	1.160.688.573,55	1.633.608.535,83
IPM	42	66,70	77,60	71,54	3,02
Valid N (listwise)	42				

Sumber : Data BPS DI. Yogyakarta, diolah 2013

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah propinsi yang menjadi sampel adalah 6 propinsi se pulau Jawa, sehingga dalam periode 7 tahun jumlah observasi (N) adalah sebanyak 42 observasi. Hasil deskriptif terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar Rp. 3.816.617.873,67 ribu dan standar deviasi sebesar Rp. 3.019.255.095,69 ribu. PAD tertinggi terjadi pada

angka Rp. 11.824.970.000,00 yaitu propinsi DKI Jakarta tahun 2010 dan terendah mencapai nilai Rp. 347.404.225,00 ribu yaitu propinsi DIY tahun 2004. Adanya perbedaan yang cukup besar nilai PAD antar propinsi karena disparitas penerimaan daerah ini masih sangat besar, karena sumber-sumber penerimaan daerah satu dengan lainnya juga berbeda-beda. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografi dll sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan tarif pungutan retribusi sangatlah bervariasi

Deskriptif terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar 10,10% dan standar deviasi sebesar 6,35%. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi sebesar 17,92% yaitu pada propinsi DKI Jakarta tahun 2010 dan terendah sebesar 0,95% yaitu propinsi DIY tahun 2007. Dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 hingga 2010 cenderung mengalami peningkatan secara berkala. Hal ini dapat diartikan pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, memberikan indikasi semakin tingginya tingkat pembangunan suatu daerah. Perbedaan nilai minimum dan maksimum yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan PDRB yang masih sangat tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah banyaknya atau sedikitnya lapangan pekerjaan, perbedaan UMR tiap daerah, dan tingkat kemajuan dari daerah itu sendiri

Hasil dekriptif terhadap tingkat serapan anggaran yang diukur dengan SiLPA yaitu selisih antara penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran rata-rata adalah sebesar Rp. -1.162.804.912,33 ribu dan standar deviasi

sebesar 8.488.758.406,51. Hal ini berarti pemerintah provinsi se pulau Jawa memiliki selisih pengeluaran, sebagian besar memiliki defisit anggaran, dimana pengeluaran anggaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Nilai Silpa tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 3.265.231.795,00 ribu dan SilPA terendah terjadi di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 yaitu sebesar Rp.-53.835.952.663,00 ribu.

Hasil deskriptif pada luas daerah rata-rata adalah sebesar 21.347,15 km² dengan standar deviasi sebesar 17.833,12. Luas wilayah terluas adalah provinsi Jawa Timur dengan luas sebesar 47.130,15 km² dan daerah dengan luas terkecil adalah DKI Jakarta dengan luas sebesar 740 km².

Hasil deskriptif terhadap DAU memiliki rata-rata sebesar Rp. 1.218.913.064,90 ribu dan standar deviasi sebesar 1.835.799.571,13 ribu. DAU tertinggi sebesar Rp. 7.730.239.000,00 di Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 dan DAU terendah terjadi pada nilai Rp. 0 yaitu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010.

Nilai rata-rata Belanja Modal adalah sebesar Rp. 1.160.688.573,55 ribu dan standar deviasi sebesar Rp. 1.633.608.535,83 ribu. Nilai Belanja Modal tertinggi adalah sebesar Rp. 7.545.074.342,00 ribu yaitu provinsi DKI Jakarta tahun 2007 dan nilai terendah adalah sebesar Rp. 94.747.519,00 ribu , yaitu provinsi DIY tahun 2006.

Hasil deskriptif terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi se Pulau Jawa rata-rata adalah sebesar 71,54% dan standar deviasi sebesar 3.02%. Hal ini berarti rata-rata indeks pembangunan manusia di provinsi se Pulau Jawa

termasuk dalam kriteria yang cukup / menengah karena berada pada interval 50 – 79,9. Artinya rata-rata setiap orang memiliki penghasilan yang lebih cukup karena pendidikannya lebih cukup tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang

4.2. Analisis Statistik

Pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, sebagai syarat utama dalam analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastis, otokorelasi.

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

4.2.1.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis statistik Kolmogorov Smirnov Test. Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan

nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006)

Hasil Uji Normalitas tersebut dapat di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.60270545
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.161
	Negative	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.225

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa signifikansi sebesar $0,225 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

4.2.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) di atas 10 (Ghozali, 2006).

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LOG_PAD	.122	8.223
PE	.133	7.500
LOG_SILPA	.754	1.326
LOG_LUAS	.708	1.412
LOG_DAU	.668	1.496

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

Tabel 4.3 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas yang terjadi pada variabel PAD, PE, SILPA, LUAS dan DAU dimana nilai

tolerance-nya di atas 0,1 dan nilai VIF-nya tidak lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa antarvariabel-variabel tersebut tidak terdapat korelasi sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas

4.2.1.3. Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini menggunakan model Durbin-Watson (*dw test*). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Autokorelasi adalah keadaan dimana variable *error-term* pada periode tertentu berkorelasi dengan variable *error-term* pada periode lain yang bermakna variabel *error-term* tidak random. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik Durbin.Watson (DW test). Jika nilai Durbin.Watson berada diantara DU (1,786) sampai 4-DU (2,214) berarti tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2006).

Hasil Uji Durbin Watson dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.941 ^a	.886	.870	.16681	1.820

a. Predictors: (Constant), LOG_DAU, LOG_SILPA, PE, LOG_LUAS, LOG_PAD

b. Dependent Variable: LOG_BM

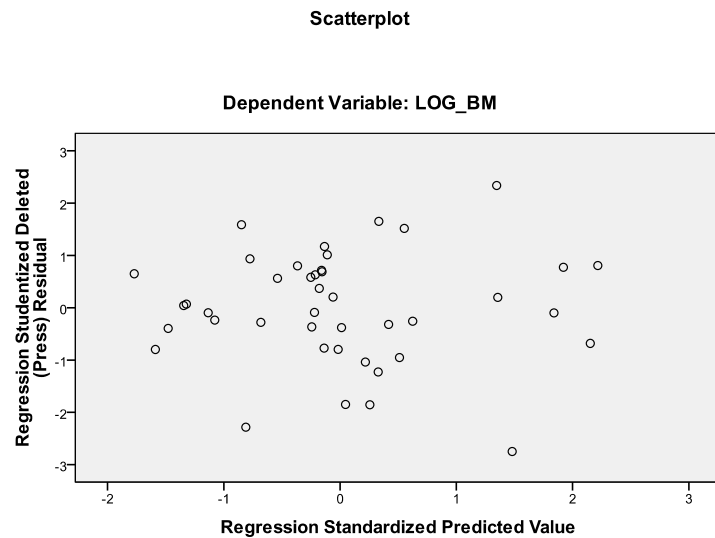
Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,820 yaitu berada diantara DU (1,786) sampai 4-DU (2,214) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

Gambar 4.1

Scatterplot untuk uji heteroskedastisitas



4.2.2. Analisis Regresi Linier

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, SilPA, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal digunakan analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan untuk mengetahui Belanja Daerah terhadap Kualitas Pembangunan Manusia digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Dep. Var	Ind. Var	Koef. Reg	T	Sig
1	Belanja Modal	(Constant)	-0.465	-0.296	0.769
		LOG_PAD	1.088	6.195	0.000
		PE	-0.010	-0.927	0.360
		LOG_SILPA	0.009	2.335	0.025
		LOG_LUAS	-0.331	-7.031	0.000
		LOG_DAU	0.051	3.719	0.001
2	IPM	(Constant)	42.439	5.426	0.000
		LOG_BM	3.309	3.726	0.001

Sumber : Data sekunder diolah, 2013

Dari kedua model regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LogBM} = -0,465 + 1,088 \log\text{PAD} - 0,010\text{PE} + 0,009\text{LogSiLPA} - 0,331\text{LogLuas} + 0,051 \text{LogDAU} \quad (4.1)$$

$$\text{IPM} = 42,439 + 3,309 \text{LogBM} \quad (4.2)$$

Nilai konstanta sebesar -0,465 menunjukkan bahwa jika suatu daerah tidak memiliki PAD, PE, SILPA, Luas wilayah dan DAU atau variabel independen sama dengan nol, maka diestimasikan besarnya Belanja Modal di

Propinsi se pulau Jawa akan $-0,465$. Sedangkan nilai konstanta sebesar $42,439$ menunjukkan bila Belanja Modal sama dengan nol maka IPM propinsi se Pulau Jawa akan sebesar $42,439$.

Hasil koefisien regresi untuk PAD adalah positif sebesar $1,088$ yang berarti setiap peningkatan PAD sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa sebesar $1,088$ persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan PAD akan menyebabkan peningkatan pada Belanja Modal, dan sebaliknya penurunan pada PAD akan diikuti dengan penurunan Belanja Modal

Hasil koefisien regresi untuk PE adalah negatif sebesar $-0,010$ yang berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan Belanja Modal di propinsi se Pulau Jawa sebesar $-0,010$ persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi negatif berarti setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan pada Belanja Modal, dan sebaliknya penurunan pada pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

Hasil koefisien regresi untuk SiLPA adalah positif sebesar $0,009$ yang berarti setiap peningkatan SiLPA sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa sebesar $0,009$ persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan SiLPA akan menyebabkan peningkatan pada Belanja Modal, dan sebaliknya penurunan pada SiLPA akan diikuti dengan penurunan Belanja Modal.

Hasil koefisien regresi untuk luas wilayah adalah negatif sebesar -0,331 yang berarti setiap peningkatan luas wilayah sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa sebesar 0,331 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi negatif berarti setiap peningkatan luas wilayah akan menyebabkan penurunan pada Belanja Modal, dan sebaliknya penurunan pada luas wilayah akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

Hasil koefisien regresi untuk DAU adalah positif sebesar 0,051 yang berarti setiap peningkatan DAU sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa sebesar 0,051 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan DAU akan menyebabkan peningkatan pada Belanja Modal, dan sebaliknya penurunan pada DAU akan diikuti dengan penurunan Belanja Modal.

Hasil koefisien regresi untuk Belanja Modal adalah positif sebesar 3,309 yang berarti setiap peningkatan Belanja Modal sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan IPM di Propinsi se Pulau Jawa sebesar 3,309 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien regresi positif berarti setiap peningkatan Belanja Modal akan menyebabkan peningkatan pada IPM, dan sebaliknya penurunan pada Belanja Modal akan diikuti dengan penurunan IPM.

4.2.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Berdasarkan

Tabel 4.5 (Tabel Analisis Regresi Linier Berganda) didapatkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*) pada model 1 sebesar 0,870 yang berarti model dengan variabel PAD, PE, SiLPA, Luas wilayah dan DAU dapat menjelaskan variasi Belanja Modal sebesar 87 persen dan sisanya sebesar 13 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Sedangkan pada pengujian pada model 2 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,239. Ha ini berarti model dengan variabel Belanja Modal mampu menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 23,9%, dan sisanya 76,1% Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.2.4 Pengujian Secara Serentak

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

Tabel 4.5 (Tabel Analisis Regresi Linier Berganda) menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F pada model 1 dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) yang berarti secara simultan variabel independen: PAD, SiLPA dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Sedangkan pada pengujian pada model 2 diperoleh sig F Sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti secara serentak Belanja Modal berpengaruh signifikan

terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan demikian kedua model telah memiliki goodness of fit (tingkat kesesuaian model) yang baik.

4.2.5 Uji Secara Parsial

Hasil perhitungan statistik seperti pada Tabel 4.5 (Tabel Analisis Regresi Linier Berganda) tersebut menunjukkan bahwa dari kelima variabel yang dimasukkan dalam model berpengaruh signifikan mempengaruhi Belanja Modal dan pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia.

Untuk variabel PAD diperoleh nilai t hitung sebesar 6,195 dan sig.t sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara signifikan terhadap Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa. Dengan demikian **Hipotesis pertama** dalam penelitian ini **didukung**.

Untuk variabel PE diperoleh nilai t hitung sebesar -0,927 dan sig.t sebesar $0,360 > 0,05$, yang berarti tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi secara signifikan terhadap Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa. Dengan demikian **Hipotesis kedua** dalam penelitian ini **tidak didukung / ditolak**.

Untuk variabel SiLPA diperoleh nilai t hitung sebesar 2,335 dan sig.t sebesar $0,025 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh SiLPA secara signifikan terhadap Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa. Dengan demikian **Hipotesis ketiga** dalam penelitian ini **didukung**.

Untuk variabel Luas Wilayah diperoleh nilai t hitung sebesar -7,031 dan sig.t sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh luas wilayah secara

signifikan tetapi arahnya berlawanan atau bertolak belakang terhadap Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa. Dengan demikian **Hipotesis keempat** dalam penelitian ini **tidak didukung / ditolak**.

Untuk variabel DAU diperoleh nilai t hitung sebesar 3,719 dan sig.t sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum secara signifikan terhadap Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa. Dengan demikian **hipotesis kelima** dalam penelitian ini **dapat didukung**.

Untuk variabel Belanja Modal diperoleh nilai t hitung sebesar 3,726 dan sig.t sebesar $0,001 < 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh Belanja Modal secara signifikan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Propinsi se Pulau Jawa. Dengan demikian **Hipotesis keenam** dalam penelitian ini **didukung**.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Propinsi se Pulau Jawa. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) serta penelitian Kusnandar dan Siwantoro (2010) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula sumber dana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga memberikan stimulus untuk meningkatkan Belajar Modal. Belanja Modal terbagi dalam belanja untuk aparatur dan belanja pelayanan publik, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja jalan, jalan bebas hambatan (highway), jembatan, gedung, pengadaan jaringan listrik dan air minum, dan sebagainya. Jadi semakin besar Pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat Belanja Modal.

Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas prekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut

4.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil analisis data menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena masih tingginya ketimpangan sosial dan disparitas yang sangat besar terhadap kondisi ekonomi antar daerah di Propinsi seluruh Pulau Jawa. Propinsi DKI yang merupakan kota metropolitan, kota industri terbesar dengan perputaran uang yang sangat besar akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lain, yang mayoritas investasi daerahnya cukup rendah. Sementara usaha-usaha daerah untuk mensejajarkan dengan daerah lain terus dilakukan, sehingga daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif rendah tetap mengalokasikan belanja modal yang besar, untuk dapat sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

Alasan lain karena otonomi daerah yang belum seluruhnya berhasil, terbukti dari masih tinggi dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa daerah tetap dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah yang besar karena mendapatkan dana dari pemerintah pusat melalui DAU, DAK dan Bagi hasil.

4.3.3 Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian menemukan bahwa SiLPA terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin besar SiLPA semakin besar pula Belanja daerah. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Kusnandar dan

Siswanto (2010) yang menemukan SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Tingkat Serapan Anggaran yang diproyeksikan dengan SiLPA merupakan penjumlahan antara nilai surplus / defisit dengan pembiayaan bersih. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Pada umumnya pos SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. SiLPA merupakan kas bebas (Free cash) yang belum terikat penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terkait dengan adanya kebijakan anggaran defisit atau karena adanya perubahan anggaran.

Struktur APBD baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya. SiLPA merepresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil dan bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga menyebabkan defisit fiskal, maka tidak ada SiLPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA). Dengan demikian keberadaan SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja anggaran yang baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan. Pertumbuhan SiLPA dapat digunakan juga untuk menilai kinerja anggaran. SiLPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SiLPA hal tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya.

4.3.4 Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2010) yang menemukan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun demikian dalam penelitian ini koefisien regresi bernilai negatif, sehingga bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa Luas wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan.

Hal ini disebabkan karena di pulau jawa justru daerah yang maju adalah daerah yang luas wilayahnya paling kecil seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta selain sebagai Ibukota Negara, daerah ini memiliki program-program pembangunan yang jauh paling besar dibandingkan daerah lain yang luas wilayahnya lebih besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini menyebabkan hubungan

terbalik (negatif) dimana luas daerah yang kecil justru mendapatkan alokasi Belanja Modal yang paling besar.

4.3.5 Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uji statistik-t diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Dana Alokasi umum secara statistik berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Dengan demikian hipotesis 5 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Propinsi se Pulau Jawa dapat diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja daerah yang ada di propinsi se Pulau Jawa sangat ditentukan oleh besar kecilnya Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui belanja modalnya.

4.3.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia

Berdasarkan analisis regresi model 2 diatas menemukan bahwa Belanja Modal secara statistik berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti semakin besar belanja modal yang dialokasikan daerah maka IPM suatu daerah akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Andrea Christy dan Adi (2009) yang menyimpulkan bahwa besarnya belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu ukuran yang secara tidak langsung digunakan untuk melihat besarnya keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat pemerintahan di daerah. Banyak pendapat

mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan terjamin adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Ketika tingkat Belanja modal rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja modal untuk peningkatan pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Mardiasmo, 2006), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan belanja modal memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk. Banyak studi menyebutkan, peningkatan belanja daerah mendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan. Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa daerah era otonomi, pemerintah daerah harus mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) maka kualitas pembangunan manusia akan semakin meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Terdapat pengaruh positif signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di propinsi se pulau Jawa. Hal ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah mempunyai dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
2. Tidak terdapat pengaruh secara signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal di propinsi se pulau Jawa. Hal ini berarti besar kecilnya tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap besarnya Belanja Modal yang akan dialokasikan dalam APBD.
3. Terdapat pengaruh positif signifikan SiLPA terhadap Belanja Modal di propinsi se pulau Jawa. Hal ini berarti semakin besar sisa lebih penyerapan anggaran akan digunakan untuk membelajakan tahun berikutnya sehingga Belanja Modal semakin besar.
4. Terdapat pengaruh negatif secara signifikan luas wilayah terhadap Belanja Modal di propinsi se pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena di Pulau Jawa luas wilayah yang kecil seperti DKI Jakarta justru memiliki Belanja Modal

yang paling besar, disesuaikan dengan tingkat pembangunan di DKI yang merupakan daerah Ibukota Negara.

5. Terdapat pengaruh positif signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di propinsi se pulau Jawa. Hal ini besar kecilnya Dana Alokasi Umum mampu memberikan dampak positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.
6. Terdapat pengaruh positif signifikan Belanja Modal terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di propinsi se pulau Jawa. Hal ini berarti semakin besar belanja modal maka semakin besar pembangunan yang terjadi di daerah tersebut termasuk dalam pelayanan masyarakat, pendidikan dan lainnya sehingga akan meningkatkan IPM suatu daerah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya obyek penelitian yang hanya terbatas pada propinsi se pulau Jawa yang hanya berjumlah 6 propinsi, sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan untuk propinsi lainnya.

5.3. Saran

1. Bagi pemerintah daerah propinsi se pulau Jawa dalam melakukan eksploitasi Pendapatan Asli Daerah hendaknya lebih proporsional dan disesuaikan dengan besarnya belanja untuk pelayanan publik, sehingga pendapatan yang diterima dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Besarnya anggaran Modal Daerah ini hendaknya pula disesuaikan dengan

Dana Alokasi Umum, besarnya SiLPA dan luas wilayah yang ada di suatu daerah.

2. Pemerintah daerah hendaknya lebih menerapkan sistem *good governance*, sehingga dalam implementasi Belanja Modal dapat dikontrol dengan baik dari penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan manipulasi anggaran, sehingga pelaksanaannya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya memperbanyak sampel dengan memperluas obyek penelitian misalnya pemerindah daerah propinsi se Indonesia agar dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi belanja modal dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. *Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2, 17 – 32.
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*. Simposium Akuntansi IX. Padang
- Adi, Priyo Hari. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Andrea, Fhino Christy & Priyo Hari Adi. 2009. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*. The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya
- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam presspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta
- _____. 2005. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta
- _____. 2006. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta
- _____. 2007. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta
- _____. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta
- _____. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta
- _____. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta

- Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis tentang tingkat efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan di provinsi nusa tenggara timur*. Jurnal Litbang NTT, IV – 03
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang
- Hafiz, Abdul Tanjung. 2006. *SiLPA dan Hak Masyarakat*. Jurnal , Unas Pasim.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2010 . *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Maimunah. 2006. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri NO 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi jawa tengah dan DIY)*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 8, 101-118.
- Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2001 - 2005
_____. Tahun 2006 – 2010
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*. Second Edition. John Wiley & Sons. New York.
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemkot/pemkab sumatera utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Solikin, Ikin. 2008. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat*. 27 Januari 2012
<http://file.upi.edu/DirektoriFPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121-IKIN_SOLIKIN/jurnal_PAD.pdf>
- Sukriy, Abdullah., & Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi STEI No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
- Suratno, Nugrho Putro. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran*

Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten / Kota di provinsi Jawa Tengah), Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.

UNDP. 1996. *Human Development Report*. Oxford University Press. New York

LAMPIRAN

Pertumbuhan Ekonomi

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	17.59	17.72	17.59	17.72	17.80	17.85	17.92
2	Jawa Barat	14.48	14.59	14.48	14.59	14.66	14.58	14.58
3	Jawa Tengah	8.47	8.47	8.47	8.47	8.46	8.49	8.47
4	DI Yogyakarta	0.99	0.97	0.99	0.97	0.97	0.96	0.95
5	Jawa Timur	15.28	15.35	15.28	15.35	15.38	15.42	15.51
6	Banten	3.45	3.46	3.45	3.46	3.46	3.46	3.46

Pendapatan Asli Daerah

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	6430334808	7597867917	8600927953	8731096245	10455565541	10601057958	11824970000
2	Jawa Barat	2846800735	3604767566	3399855352	4221668696	5275051504	5577588779	5622864543
3	Jawa Tengah	1865390530	2490643742	2549717424	2932805173	3698843478	4000735711	3729061655
4	DI Yogyakarta	347404225	401912338	433757022	488890620	632872312	645145551	621738060
5	Jawa Timur	2860561595	3464580023	3497649313	4164250657	5212319316	5708030337	6376891252
6	Banten	818246374	1070237769	1240953343	1298456276	1661168634	1687721367	1607549000

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	53053043	1029369408	-824046820	-2641305750	3265231795	-248417843	1473091154
2	Jawa Barat	373897389	515605998	139460962	-122214064	-53835952663	-407723926	721579760
3	Jawa Tengah	345162460	590528588	70823870	290570060	40752133	496546939	658283219
4	DI Yogyakarta	6378846	23380780	30514602	-155832394	-194676336	-41420363	19611038
5	Jawa Timur	437687410	564552923	-23276934	-37882660	871444819	225656007	-225772353
6	Banten	-8845745298	109762516	-224221886	-91400000	97397793	15275181	304867098

Luas Wilayah

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	740	740	740	740	740	740	740
2	Jawa Barat	34817	34817	34817	34817	34817	34817	34817
3	Jawa Tengah	32548	32548	32548	32548	32548	32548	32548
4	DI Yogyakarta	3186	3186	3186	3186	3186	3186	3186
5	Jawa Timur	47130	47130	47130	47130	47130	47130	47130
6	Banten	9662	9662	9662	9662	9662	9662	9662

Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	907556000	773023900	772000000	119943000	0	0	0
2	Jawa Barat	573778000	570660000	565753000	933436000	904358915	984297824	1086123940
3	Jawa Tengah	553064000	549956000	549956000	1050732000	1053491871	1130742601	1168787757
4	DI Yogyakarta	248049000	238692000	402484000	437379000	511773394	523919948	527471247
5	Jawa Timur	463328000	454635000	820773000	1091155000	1022860627	1118478350	1212934765
6	Banten	187863000	198018000	245294000	330597000	342743861	361179087	381979019

Belanja Modal

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	3808778965	4310591987	5432050727	7545074342	2581600192	4805801135	5243146697
2	Jawa Barat	425396257	545743929	630632185	411614692	354305897	726481161	1055536741
3	Jawa Tengah	447011725	481068440	635301282	453676550	530106603	547058588	419476324
4	DI Yogyakarta	131691280	168511053	94747519	121975815	191833726	192938051	127463112
5	Jawa Timur	571032422	687080124	801847428	592440600	548509682	837299992	877876930
6	Banten	163330395	282064385	465048365	399637828	593948138	682566128	826622697

Indeks Pembangunan Manusia

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	DKI Jakarta	75.80	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60
2	Jawa Barat	69.10	69.93	70.32	70.71	71.12	71.64	72.29
3	Jawa Tengah	68.90	69.78	70.25	70.92	71.60	72.10	72.49
4	DI Yogyakarta	72.90	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77
5	Jawa Timur	66.80	68.42	69.18	69.78	70.38	71.06	71.62
6	Banten	67.90	68.80	69.11	69.29	69.70	70.06	70.48

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	42	3.47E8	1.18E10	3.8166E9	3.01926E9
PE	42	.95	17.92	10.0957	6.35048
SiLPA	42	-5.38E10	3.27E9	-1.1628E9	8.48876E9
Luas Wilayah	42	740.00	47130.15	21347.1517	17833.12165
DAU	42	.00	7.73E9	1.2189E9	1.83580E9
Belanja Modal	42	94747519.00	7.55E9	1.1607E9	1.63361E9
IPM	42	66.70	77.60	71.5390	3.02069
Valid N (listwise)	42				

Regression

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LOG_DAU, LOG_SILPA, PE, LOG_LUAS, LOG_PAD ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.941 ^a	.886	.870	.16681	1.820

a. Predictors: (Constant), LOG_DAU, LOG_SILPA, PE, LOG_LUAS, LOG_PAD

b. Dependent Variable: LOG_BM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.797	5	1.559	56.046	.000 ^a
	Residual	1.002	36	.028		
	Total	8.799	41			

a. Predictors: (Constant), LOG_DAU, LOG_SILPA, PE, LOG_LUAS, LOG_PAD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.797	5	1.559	56.046	.000 ^a
	Residual	1.002	36	.028		
	Total	8.799	41			

a. Predictors: (Constant), LOG_DAU, LOG_SILPA, PE, LOG_LUAS, LOG_PAD

b. Dependent Variable: LOG_BM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.465	1.573		-.296	.769
	LOG_PAD	1.088	.176	.999	6.195	.000
	PE	-.010	.011	-.143	-.927	.360
	LOG_SILPA	.009	.004	.151	2.335	.025
	LOG_LUAS	-.331	.047	-.470	-7.031	.000
	LOG_DAU	.051	.014	.256	3.719	.001

a. Dependent Variable: LOG_BM

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LOG_PAD	.122	8.223
	PE	.133	7.500
	LOG_SILPA	.754	1.326
	LOG_LUAS	.708	1.412
	LOG_DAU	.668	1.496

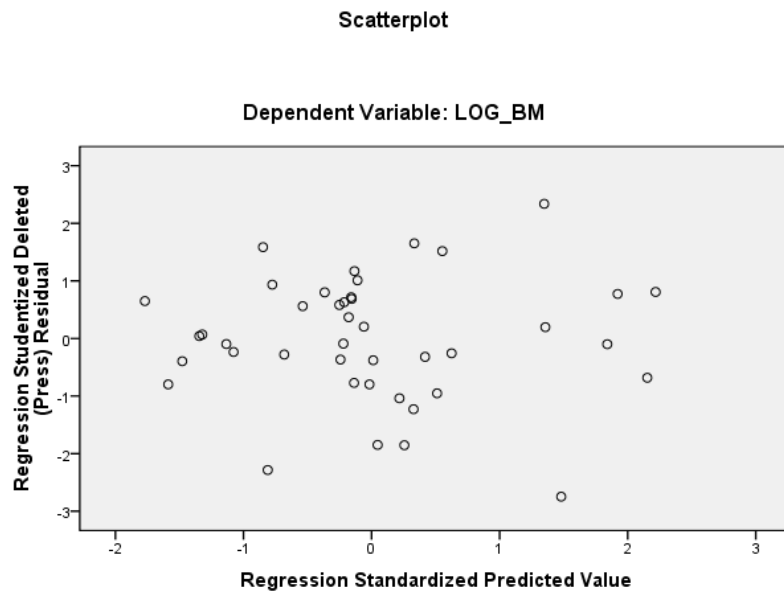
a. Dependent Variable: LOG_BM

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi			Variance Proportions			
		Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	LOG_PAD	PE	LOG_SILPA
1	1	4.944	1.000	.00	.00	.00	.01
	2	.789	2.502	.00	.00	.00	.68
	3	.212	4.833	.00	.00	.14	.20
	4	.041	10.961	.00	.00	.04	.00
	5	.014	19.054	.00	.00	.00	.04
	6	.000	197.229	1.00	1.00	.82	.07

a. Dependent Variable: LOG_BM

UJI HETEROSKEDASTISITAS



UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a, b}	N	42
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.60270545
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.161
	Negative	-.107
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.045
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.225

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LOG_BM ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IPM

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.239	2.63504

a. Predictors: (Constant), LOG_BM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	96.371	1	96.371	13.879	.001 ^a
	Residual	277.737	40	6.943		
	Total	374.108	41			

a. Predictors: (Constant), LOG_BM

b. Dependent Variable: IPM

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	42.439	7.822		5.426	.000
LOG_BM	3.309	.888	.508	3.726	.001

a. Dependent Variable: IPM

